

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH (APBD)
(Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)**

Yulinda Devi Pramita

Lilik Andriyani

Universitas Muhammadiyah Magelang

Abstract

This research examines the influence of organizational commitment, accountability, public participation and transparency of public policy on the relationship between knowledge about the budget with the control board of the council on local finance (budget). The problem is whether the council in carrying out its oversight functions over the board due to the knowledge about the budget because council members are generally depart from the political (party) or more caused by other problems. Sample of research using purposive sampling that is a member of the board of the Commission for Economic, Financial and Legislative Budget Board of the City and County area as Kedu Residency. The number of respondents of this study were 99 copies or 67%. The results prove the relationship between knowledge about the budget with the control board of the council on local finance are influenced by organizational commitment, accountability and public participation. While the transparency of public policy does not affect the relationship between knowledge about the budget with the control board of the council on local finance. Therefore this study sported anotheotr studies before.

Keywords: Organizational Commitment, Accountability, Public Participation, Transparency in Public Policy, Scientific Council on Budget and Financial Control Area (Budget)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD (Ritonga, 2009) dan hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota).

Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan

diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena faktor lain. Selain itu, apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Penelitian sejenis pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran

dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan. Sikap ketidakpercayaan inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) dan apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

4. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
5. Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002: 61). Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai strategi yang telah ditetapkan. Anggaran daerah (APBD) harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Mardiasmo, 2002: 67-68) otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas dan diketahui publik.

Garis besar Alur Penyusunan dan Penetapan APBD menurut Halim, 2007: 28 dan Sihombing, 2007

Insert Gambar 2.1; 2.2; 2.3

2. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32/2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Alamsyah (1997) dalam Rosseptalia (2006) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah

digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yudono (2002) dalam Coryanata (2007) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

5. Komitmen Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Suhartono (2006)). Jadi, psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi memperkuat atau

memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

6. Akuntabilitas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

H₃: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

7. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007). Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon, dkk (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif.

H₄: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

8. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

H₅: Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

9. Model Penelitian

Insert Gambar 2.4

III. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karesidenan Kedu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen. Metoda pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang berkaitan dengan keuangan daerah (APBD). Metode pengumpulan data primer menggunakan instrumen kuesioner. Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi, teori terkait, dan penambahan variabel moderasi.

Insert Tabel 3.1

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor kostruk (Ghozali, 2006: 50). Metode *pearson correlation* menyatakan butir pertanyaan/pernyataan dikatakan valid apabila signifikansi butir pertanyaan/pernyataan (*2-tailed*) $\leq 0,05$ dan atau $\leq 0,01$.

Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2006: 46).

3. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari 6 variabel meliputi: (a) variabel independen: pengetahuan dewan tentang anggaran (b) variabel dependen: pengawasan dewan pada keuangan daerah (c) variabel moderating: komitmen organisasi politik, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

a. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Anggaran ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Pengetahuan terhadap penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD, pengetahuan terhadap tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD.

b. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Individu mengidentifikasi dirinya pada suatu organisasi tertentu tempat individu tersebut bekerja dan berharap untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi kerja. Menurut Feris dan Aranya (1987) dalam Trisnarningsih (2007) indikator-indikator komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, rasa kesetiaan pada organisasi.

c. Akuntabilitas

Pengetahuan dewan tentang standar operasional prosedur akuntabilitas, manfaat LAKIP untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, pengetahuan dewan tentang prinsip penyusunan LAKIP dan pengetahuan dewan tentang mekanisme penyampaian LAKIP. Prinsip penyusunan LAKIP dalam pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah pusdiklatwas BPKP (2007) yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

d. Partisipasi Masyarakat

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam advokasi

APBD, pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

e. Transparansi Kebijakan Publik

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

f. Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah

Keterlibatan Dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, pelaksanaan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD, keterlibatan Dewan dalam pengesahan APBD, kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun, keyakinan Dewan bahwa APBD telah memiliki transparansi, keterlibatan Dewan dalam memantau pelaksanaan APBD dan evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD, permintaan keterangan oleh Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut dari Dewan jika terjadi kejanggalan dalam LKPJ APBD.

4. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

5. Metode Analisis

Setelah data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Analisis statistik data penelitian menggunakan program *SPSS for Windows 12.00*

a. Pengujian hipotesis 1

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
 α = Konstanta
 PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran

b. Pengujian hipotesis 2

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_2 \text{KO} + \beta_3 \text{PDTA} \times \text{KO} + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana: Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
 α = Konstanta
 PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran
 KO = Komitmen Organisasi
 PDTA,KO = Interaksi antara PDTA dan KO
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

c. Pengujian hipotesis 3

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_4 \text{AK} + \beta_5 \text{PDTA} \times \text{AK} + e \dots \dots \dots (3)$$

- Dimana: Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
- α = Konstanta
- AK = Akuntabilitas
- PDTA, AK = Interaksi antara PDTA dan AK
- $\beta_1 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

d. Pengujian hipotesis 4

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_6 \text{PM} + \beta_7 \text{PDTA} \times \text{PM} + e \dots \dots \dots (4)$$

- Dimana: Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
- α = Konstanta
- PM = Partisipasi Masyarakat
- PDTA, PM = Interaksi antara PDTA dan PM
- $\beta_1 \beta_6 \beta_7$ = Koefisien Regresi

e. Pengujian hipotesis 5

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_8 \text{TKP} + \beta_9 \text{PDTA} \times \text{TKP} + e \dots \dots \dots (5)$$

- Dimana: Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)
- α = Konstanta
- TKP = Transparansi Kebijakan Publik
- PDTA, TKP = Interaksi antara PDTA dan TKP
- $\beta_1 \beta_8 \beta_9$ = Koefisien Regresi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Kuesioner yang digunakan penelitian ini sebanyak 99 eksemplar atau 67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data dari kuesioner tersebut diuji statistik deskriptif yang didasarkan pada identitas responden dan jawaban responden pada item pernyataan di setiap variabel. Hasil olah data statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Insert Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.9

Berdasarkan tabel statistik deskriptif responden diperoleh kesimpulan responden dengan pendidikan terakhir S1 paling banyak berpartisipasi, hal ini mempengaruhi kemampuan anggota dewan dalam menganalisis suatu hal dalam melakukan tupoksi dewan khususnya pengawasan keuangan daerah (APBD). Responden paling banyak merupakan anggota dewan baru, pengalaman sebagai anggota DPRD satu periode dan belum pernah mengikuti pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah. Hasil tersebut sangat memprihatinkan mengingat anggota dewan yang umumnya berangkat dari partai politik dan memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap semua pernyataan dalam variabel kuesioner penelitian tergolong tinggi.

2. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

a. Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 adalah pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresinya:

Insert Tabel 4.10

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 2,566 + 0,380 \text{ PDTA} + e$$

p value = 0,000 membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar +0,380 menjadikan H1 penelitian ini diterima.

Ternyata pengetahuan dewan tentang anggaran tidak hanya terbatas dari pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah yang pernah diikuti anggota dewan melainkan juga dipengaruhi latar belakang pendidikan dewan, pengalaman politik, pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD dan pegawai eksekutif serta komisi yang dibidangi di DPRD. Akan tetapi, keikutsertaan dan tanggapan yang baik dari dewan terhadap pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah akan menambah pengetahuan dewan tentang anggaran yang nantinya akan memaksimalkan peran DPRD dalam fungsi pengawasan. Kebijakan pemerintah yang sering berubah terkait peraturan sektor publik menjadikan pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah sebagai salah satu media untuk menyampaikan peraturan pemerintah yang terbaru terkait keuangan daerah sehingga menambah pengetahuan dewan tentang keuangan daerah (APBD). Menurut Tamim dan Hermansjah (2002) dalam <http://buletinsuligi.blogspot.com>, proses pelaksanaan pembelajaran atau instruksional adalah merupakan proses yang paling penting dalam proses pelaksanaan diklat. Peranan tenaga

kediklatan disini merupakan peranan kunci yaitu membantu proses belajar peserta diklat agar dapat mencapai perubahan perilaku dan meningkatkan kompetensi mereka seperti yang diharapkan.

b. Pengujian hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 adalah pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresinya:

Insert Tabel 4.11

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 9,632 - 1,351PDTA - 1,697KO + 0,415PDTAxKO + e$$

p value = 0,036 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi sebesar +0,415 menjadikan H2 penelitian ini diterima.

Dewan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan pada keuangan daerah. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis dewan yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan berusaha untuk memiliki pengetahuan tentang anggaran dan keuangan daerah secara maksimal. Akan tetapi menurut kondisi praktisnya yang peneliti amati saat melakukan penelitian di DPRD Karesidenan Kedu, banyak anggota dewan tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja dan sebagai wakil rakyat. Hal ini

dibuktikan dengan sikap ketidakmauan dewan untuk berusaha di atas batas normal mensukseskan kinerja lembaga legislatif tempatnya bekerja, loyalitas dan profesionalisme kinerja yang kurang. Anggota dewan kurang menghargai waktu dan pekerjaan bahkan cenderung kurang memperhatikan aspirasi masyarakat.

c. Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 adalah pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Hasil analisis regresinya:

Insert Tabel 4.12

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 12,565 - 2,019PDTA - 2,345AK + 0,563PDTA \times AK + e$$

p value = 0,016 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas sebesar +0,563 dengan tingkat signifikansi 0,016 menjadikan H3 penelitian ini diterima.

Dewan sebagai anggota legislatif mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada DPRD dan masyarakat. Akan tetapi ada pula anggota dewan yang tidak mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif.

d. Pengujian hipotesis 4

Pengujian hipotesis 4 adalah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Hasil analisis regresinya:

Insert Tabel 4.13

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 8,402 - 0,988PDTA - 1,500PM + 0,351PDTAxPM + e$$

p value = 0,038 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar +0,351 dengan tingkat signifikansi 0,038 menjadikan H4 penelitian ini diterima.

Dewan harus mengetahui bahwa APBD yang disusun telah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus benar-benar menjadikan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dan DPRD sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dewan selalu mengawasi pelaksanaan APBD dan mengetahui jika terdapat perubahan kebijakan terkait APBD lembaga eksekutif melakukan sosialisasi di masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit pula anggota dewan yang menganggap partisipasi masyarakat tidak diperlukan dalam proses penyusunan anggaran.

e. Pengujian hipotesis 5

Pengujian hipotesis 5 adalah pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresinya:

Insert Tabel 4.14

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = -0,355 + 0,962PDTA + 0,859TKP - 0,173PDTA \times TKP + e$$

p value = 0,224 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebesar -0,173 menjadikan H5 penelitian ini ditolak.

Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Akses terhadap informasi sektor publik dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerah setempat memajukan SIKD.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Data penelitian ini sebanyak 99 kuesioner yang diisi oleh anggota dewan komisi perekonomian, keuangan dan atau badan anggaran DPRD se-Karesidenan Kedu.
- b. Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD).
- c. Hasil pengujian H2 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Pengujian H3 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil uji H4 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil uji H5 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2. Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya, perlu juga mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya seperti komitmen politik, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang sekiranya

- dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- b. Memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.
 - c. Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ke anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki.
 - d. Bagi anggota dewan perlu adanya pendidikan pelatihan keuangan daerah (APBD) agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah dan anggota dewan wajib mengikuti dan harus dapat mengaplikasikannya dalam tupoksi anggota dewan di DPRD.
 - e. Bagi anggota dewan harus mengerti, menanyakan secara langsung kepada lembaga eksekutif dan masyarakat, benar-benar serius mengawasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada bagian proses penyusunan anggaran melalui musrenbang yang diselenggarakan lembaga eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- . Efektivitas Diklat. <http://buletinsuligi.blogspot.com/2010/05/efektivitas-diklat.html>. Akses 21 Juli 2010.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

- _____, *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Kelima.* Ciawi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2006. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.* 2007. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
- Ritonga, Irwan. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia.* Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Rohmah, Siti Maziah. 2006. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Komitmen Profesi terhadap kepuasan kerja auditor (Studi Empiris pada KAP di Yogyakarta). *Skripsi.* FE Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, *Skripsi.* Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sihombing, Edison. 2007. *Penganggaran 2008.* Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi IX* Padang.
- Supriyono. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi, Keinginan Sosial dan Asimetri Informasi terhadap Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dengan Kinerja Manajer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 20, Hal 40-50.
- Sutaat. 2004. *Persepsi Legislatif tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah.*

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

Solihin, Dadang. 2008. *Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD*. Jakarta. Seminar Peningkatan Kapasitas DPRD.

Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

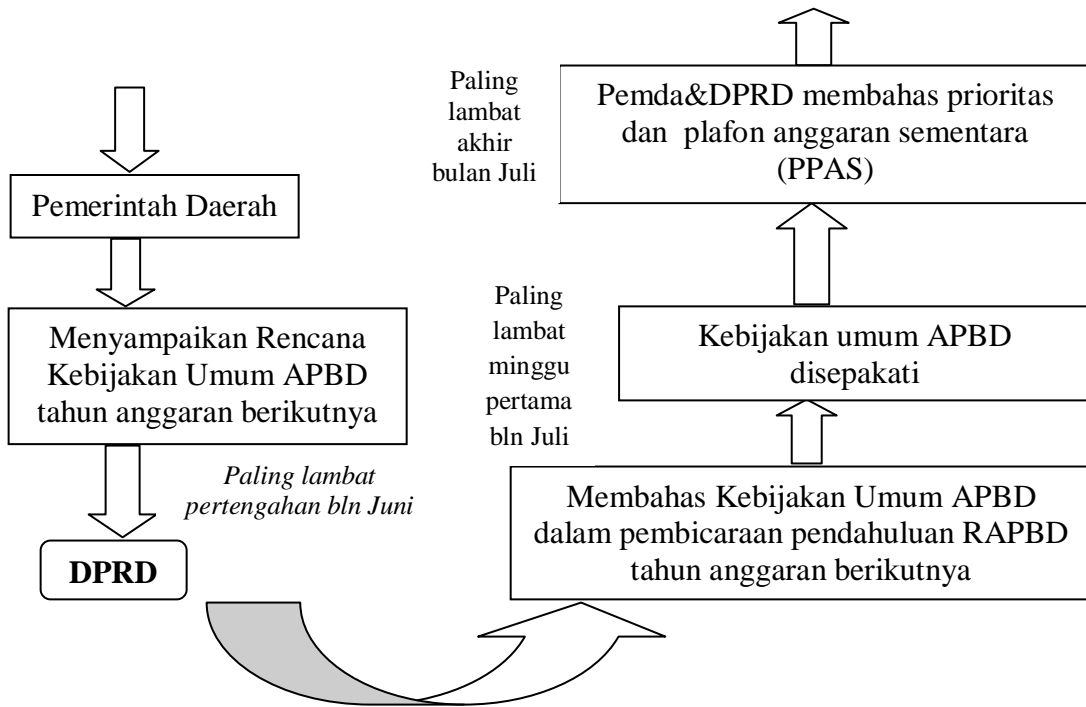
Werimon, Simson, Imam Ghazali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

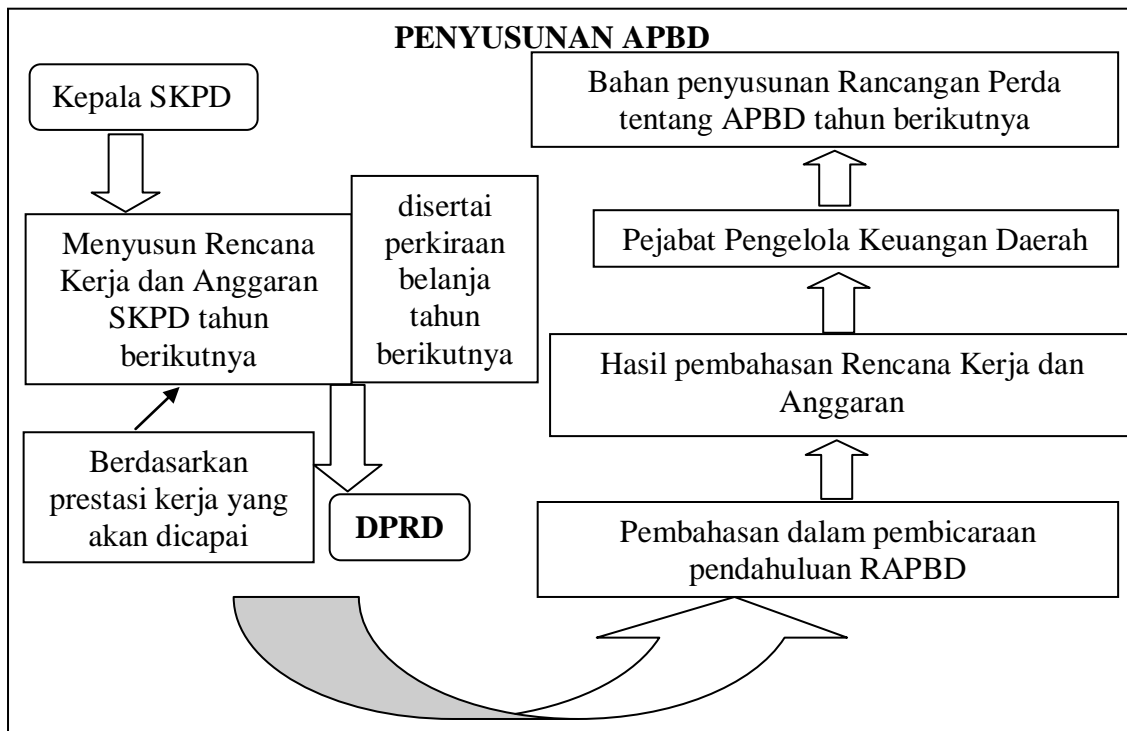
PENYUSUNAN APBD

Pemda mengadakan Musrenbang bersama-sama DPRD, dan masyarakat melakukan jaring asmara

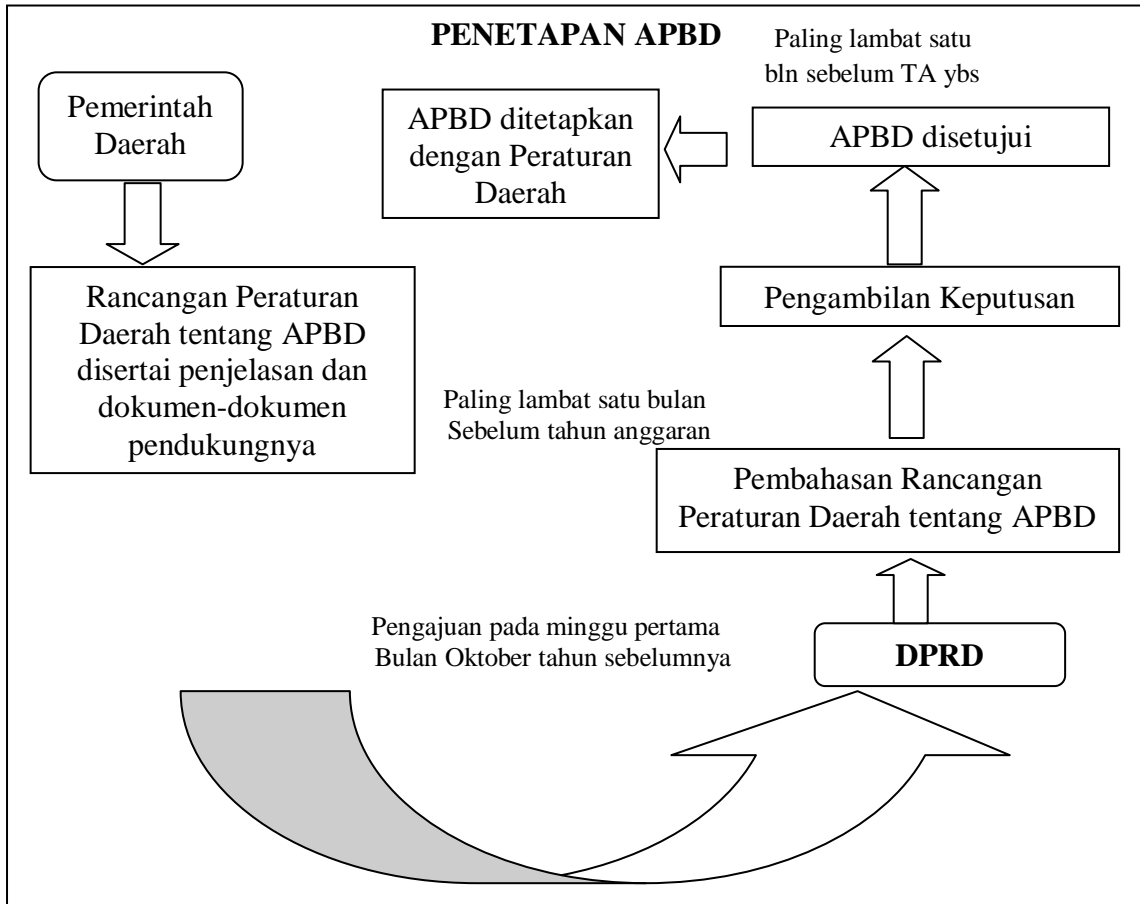
Dijadikan acuan bagi setiap SKPD menyusun RKA-SKPD



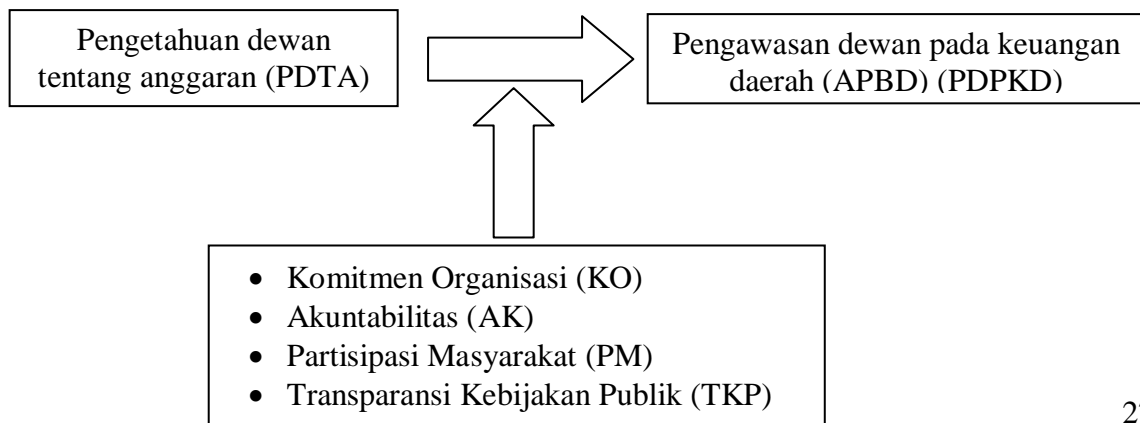
Gambar 2.1
Alur Penyusunan APBD pada Tingkat Pemerintah Daerah



Gambar 2.2
Alur Penyusunan APBD pada Tingkat SKPD



Gambar 2.3
Alur Penetapan APBD



Gambar 2.4
Model Penelitian

Tabel 3.1
Rincian Populasi dan Estimasi Sampel Penelitian

Keterangan	Komisi Perekonomian dan Keuangan Daerah	Badan Anggaran <i>non</i> Komisi Perekonomian dan Keuangan Daerah
1) DPRD Kota Magelang	7 orang	4 orang
2) DPRD Kabupaten Magelang	12 orang	12 orang
3) DPRD Kabupaten Purworejo	10 orang	13 orang
4) DPRD Kabupaten Kebumen	23 orang	9 orang
5) DPRD Kabupaten Temanggung	10 orang	11 orang
6) DPRD Kabupaten Wonosobo	11 orang	13 orang
Jumlah	135 orang	
Estimasi sampel penelitian	70 orang	
Presentase	51,9%	

Tabel 4.1
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim, dengan rincian:	
1) DPRD Kota Magelang	= 11 eksemplar
2) DPRD Kabupaten Magelang	= 24 eksemplar
3) DPRD Kabupaten Purworejo	= 23 eksemplar
4) DPRD Kabupaten Kebumen	= 32 eksemplar
5) DPRD Kabupaten Temanggung	= 21 eksemplar
6) DPRD Kabupaten Wonosobo	= 24 eksemplar
Kuesioner yang tidak kembali	36
Jumlah kuesioner yang kembali dan dianalisis, dengan rincian:	
1) DPRD Kota Magelang	= 10 eksemplar
2) DPRD Kabupaten Magelang	= 21 eksemplar
3) DPRD Kabupaten Purworejo	= 13 eksemplar
	99

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

4) DPRD Kabupaten Kebumen	= 24 eksemplar
5) DPRD Kabupaten Temanggung	= 17 eksemplar
6) DPRD Kabupaten Wonosobo	= 13 eksemplar
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>)	67%
Tingkat pengembalian yang dapat digunakan (<i>usable response rate</i>)	67%

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	79	39,3	79,8	79,8
	Perempuan	20	10,0	20,2	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.3
Usia Responden

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang dari sama dengan 30 th	7	3,5	7,1	7,1
	31-40 th	31	15,4	31,3	38,4
	41-50 th	50	24,9	50,5	88,9
	lebih dari sama dengan 51 th	11	5,5	11,1	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	26	12,9	26,3	26,3
	SMK	3	1,5	3,0	29,3
	D1/D2/D3	16	8,0	16,2	45,5
	S1	45	22,4	45,5	90,9
	S2	9	4,5	9,1	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.5
Keikutsertaan Responden dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum pernah	38	18,9	38,4	38,4
	1 kali	18	9,0	18,2	56,6
	2-3 kali	19	9,5	19,2	75,8
	4 kali atau lebih	24	11,9	24,2	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.6
Pengalaman Politik Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang dari sama dengan 2 th	14	7,0	14,1	14,1
	2-5 th	28	13,9	28,3	42,4
	lebih dari sama dengan 5 th	57	28,4	57,6	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.7
Pengalaman Responden sebagai anggota DPRD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Satu perioda	62	30,8	62,6	62,6
	Dua perioda	29	14,4	29,3	91,9
	Lebih dari dua perioda	8	4,0	8,1	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.8
Komisi Responden di DPRD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Komisi Perekonomian dan Keuangan	47	23,4	47,5	47,5
	Badan Anggaran	35	17,4	35,4	82,8
	Komisi Perekonomian, Keuangan dan Badan Anggaran	17	8,5	17,2	100,0
	Total	99	49,3	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

		PDTA	KO	AK	PM	TKP	PDPKD
N	Valid	99	99	99	99	99	99
	Missing	102	102	102	102	102	102
Mean		4,1742	4,0724	4,2323	3,8153	3,6465	4,1523
Std. Error of Mean		,03174	,05613	,04261	,06886	,07109	,03341
Median		4,1875	4,0000	4,1429	4,0000	3,8000	4,2308
Mode		4,25 ^a	4,00	4,00	4,14	4,00	4,23
Std. Deviation		,31583	,55846	,42397	,68520	,70730	,33240
Variance		,100	,312	,180	,469	,500	,110
Range		1,63	2,33	2,00	2,71	3,20	1,54
Minimum		3,38	2,67	3,00	2,29	1,80	3,46
Maximum		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum		413,25	403,17	419,00	377,71	361,00	411,08

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.10
Pengaruh antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.566	.417		6,152	.000
	PDTA	.380	.100	.361	3,813	.000

a. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Hasil Regresi Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 ^a	.130	.121	.31158	1.935

a. Predictors: (Constant), PDTA

b. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.11

Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.632	3.438		2,801	.006
	PDTA	-1.351	.815	-1.284	-1,657	.101
	KO	-1.697	.828	-2.850	-2,050	.043
	PDTAxKO	.415	.196	3.565	2,122	.036

a. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Hasil Regresi Variabel Moderat (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi) terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.422 ^a	.178	.152	.30611	1.944

a. Predictors: (Constant), PDTA^xKO, PDTA, KO

b. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.12

Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Akuntabilitas dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.565	4.092		3.071	.003
	PDTA	-2.019	.984	-1.919	-2.052	.043
	AK	-2.345	.955	-2.991	-2.456	.016
	PDTA ^x AK	.563	.230	3.836	2.451	.016

a. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Hasil Regresi Variabel Moderat (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Akuntabilitas) terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.427 ^a	.182	.156	.30530	1.835

a. Predictors: (Constant), PDTA^xAK, PDTA, AK

b. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.13
Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.402	2.777		3.025	.003
	PDTA	-.988	.661	-.939	-1.494	.138
	PM	-1.500	.704	-3.091	-2.131	.036
	PDTA \times PM	.351	.167	3.420	2.100	.038

a. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Hasil Regresi Variabel Moderat (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat) terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.414 ^a	.171	.145	.30731	1.906

a. Predictors: (Constant), PDTA \times PM, PDTA, PM

b. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Tabel 4.14
Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.355	2.076		-.171	.865
	PDTA	.962	.502	.914	1.916	.058
	TKP	.859	.586	1.827	1.465	.146
	PDTA \times TKP	-.173	.142	-1.667	-1.224	.224

a. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

Hasil Regresi Variabel Moderat (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik) terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.485 ^a	.235	.211	.29534	1.986

a. Predictors: (Constant), PDTA \times TKP, PDTA, TKP

b. Dependent Variable: PDPKD

Sumber: Data primer, diolah 2010

KUESIONER PENELITIAN

❖ LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah akibat tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan pada masyarakat memburuk dan berdampak pada krisis ekonomi dan krisis kepercayaan serta mengarah pada reformasi. Arus reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*).

UU No. 33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah yang menyebabkan perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki *power*. Implikasi positif diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD adalah diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di

masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dampak lain otonomi daerah yaitu adanya tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Selain itu, apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

❖ **PETUNJUK PENGISIAN DAN PENGIRIMAN KUESIONER**

A. Cara Pengisian Kuesioner adalah:

1. Semua pertanyaan dijawab dengan cara **memberikan tanda silang (X) atau tanda centang (√)** pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena saya hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara/i.

3. Saya sangat mengharapkan pengembalian kuesioner ini **paling lambat** dalam jangka waktu **satu (1) minggu** sejak Bapak/Ibu/Saudara/i menerimanya.
4. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan melengkapi kuesioner ini.

B. Keterangan :

- STS** : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
TS : Tidak Setuju (Skor 2)
TT : Tidak Tahu (Skor 3)
S : Setuju (Skor 4)
SS : Sangat Setuju (Skor 5)

A. BAGIAN PERTAMA

PETUNJUK : Bagian ini menanyakan tentang identitas Bapak/Ibu/Saudara/I serta pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai anggota dewan.

1. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
2. Usia : a. ≤ 30 tahun
b. 31 – 40 tahun
c. 41 – 50 tahun
d. ≥ 51 tahun
3. Pendidikan Terakhir: a. SMA
b. SMK
c. D1/D2/D3
d. S1
e. S2
f. S3
Sebutkan bidang pendidikan:.....
4. Keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah:
a. Belum pernah
b. 1 kali
c. 2-3 kali
d. 4 kali atau lebih
5. Pengalaman politik : a. ≤ 2 tahun

- b. 2 – 5 tahun
 - c. \geq 5 tahun
6. Pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD:
- a. Satu perioda
 - b. Dua perioda
 - c. Lebih dari dua perioda
7. Komisi : a. Komisi Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- b. Panitia Anggaran

B. BAGIAN KEDUA

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai hal-hal terkait pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i tentang anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah dan SKPD. Pengetahuan tentang anggaran dimaksudkan untuk menjalankan fungsi dewan dalam mengawasi keuangan daerah (APBD).

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.					
2.	Prinsip anggaran yang bersifat komprehensif tidak memasukkan dana <i>non-budgetair</i> .					
3.	Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi.					
4.	APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah.					
5.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
6.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
7.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur.					
8.	Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.					

9.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
10.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
11.	Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.					
12.	Jumlah anggaran yang disetujui dewan legislatif harus termanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efisien dan efektif.					
13.	Anda sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD.					
14.	Anda sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan APBD.					
15.	Anda sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.					
16.	Anda sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD.					

C. BAGIAN KETIGA

- PETUNJUK :** Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i tentang berbagai hal terkait komitmen dan loyalitas pada lembaga legislatif dan khususnya pada komisi yang Bapak/Ibu/Saudara/i bidangi.

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anda sebagai anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif tempat Anda bekerja.					
2.	Badan legislatif di tempat Anda bekerja sebagai anggota dewan sangat berarti bagi Anda.					
3.	Anda sebagai anggota dewan merasa masalah di dalam badan legislatif tempat Anda bekerja juga seperti masalah Anda.					

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
4.	Anda sebagai anggota dewan mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif di tempat Anda bekerja.					
5.	Anda sebagai anggota dewan saat ini masih tetap bertahan dalam badan legislatif tempat Anda bekerja karena komitmen dan loyalitas Anda sebagai anggota dewan terhadap badan legislatif.					
6.	Anda sebagai anggota dewan akan bersikap profesional terhadap kinerja yang Anda lakukan.					

D. BAGIAN KEEMPAT

PETUNJUK : Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku anggota dewan legislatif tentang akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah dan SKPD.

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggota dewan perlu mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP yang disusun pemerintah daerah dan SKPD.					
2.	Anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas serta tanggungjawab instansi terkait pelaksanaan keuangan daerah (APBD).					
3.	Akuntabilitas merupakan pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, hasil, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.					
4.	Anggota dewan mengetahui prinsip penyusunan LAKIP harus jujur, objektif dan transparan serta memiliki prinsip pertanggungjawaban, prinsip prioritas dan prinsip manfaat.					
5.	Anggota dewan perlu mengetahui bahwa penyampaian LAKIP dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.					
6.	Anggota dewan perlu mengetahui mekanisme penyampaian pelaporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang membuat, menerima serta pengguna LAKIP.					

7.	LAKIP meliputi pengungkapan mandat apa yang diemban instansi, perencanaan strategis, perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja instansi, serta analisis akuntabilitas kinerja.					
----	---	--	--	--	--	--

D. BAGIAN KELIMA

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan lembaga eksekutif dalam menyusun arah dan kebijakan keuangan daerah (APBD).

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat.					
2.	Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.					
3.	Dalam penyusunan APBD selalu melibatkan masyarakat.					
4.	Dalam advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat.					
5.	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.					
6.	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.					
7.	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.					

E. BAGIAN KEENAM

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif terkait penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi anggaran.

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Selama ini pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disunnya.					
2.	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses atau					

	diperoleh masyarakat.					
3.	Selama ini pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.					
4.	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.					
5.	Saat ini pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggarannya.					

F. BAGIAN KETUJUH

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi dan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku dewan legislatif dalam menjalankan fungsi legislatifnya yaitu mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi keuangan daerah (APBD).

No	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	Anggota Dewan selalu melakukan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.					
3.	Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam pengesahan APBD.					
4.	Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak pemerintah daerah.					
5.	Anggota Dewan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.					
6.	Anggota Dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD.					
7.	Anggota Dewan selalu mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban yang disusun pemerintah daerah.					
8.	Evaluasi yang dilakukan Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.					
9.	Anggota Dewan selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati atau Walikota					
10.	Anggota Dewan selalu mengusut dan					

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

	menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.					
11.	Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.					
12.	Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat keuangan.					
13.	Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program					